BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Partisipasi Politik

Pengertian partisipasi sangat luas dan para pakar mengartikan partisipasi dengan berbagai definisi. Penjelasan partisipasi mengacu kepada partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat, maka menurut Mubyarto (1994:35) merupakan kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Davis (dalam Ndraha, 1993:37) mengartikan partisipasi sebagai suatu dorongan mental dan emosional yang menggerakan mereka untuk bersama-sama mencapai tujuan dan bersama-sama bertanggung jawab. Secara sederhana partisipasi merupakan peran serta masyarakat terhadap sebuah atau berbagai kegiatan dalam kehidupannya yang sifatnya sosial (memasyarakat).

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi sebagai asas Negara. Asumsi yang mendasari demokrasi (dan partisipasi) orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Demokrasi biasa dikaitkan dalam pendidikan politik rakyatnya, yaitu dikala pemilu misalnya. Jadi karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat, maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan partisipasi politik menurut Surbakti (1999:140) ialah

keikutsertaan warga Negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Sementara menurut Maran (2007:147), partisipasi politik merupakan keterlibatan individu sebagai usaha terorganisir oleh para warga Negara untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijaksanaan umum. Usaha ini dilakukan berdasarkan kesadaran akan tanggung jawab mereka terhadap kehidupan bersama sebagai suatu bangsa dalam suatu Negara. Rush dan Althoff (2007:23), mengemukakan satu definisi umum dari partisipasi politik :

> "Kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan Negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy)".

Negara-negara demokratis mempunyai pemikiran yang mendasari konsep partisipasi politik adalah bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk kepemimpinan. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya melalui pemberian suara atau kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalurkan atau sekurang-kurangnya diperhatikan, dan bahwa mereka sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan dari mereka yang berwewenang untuk membuat keputusan yang mengikat. Dengan perkataan lain, aka nada suatu kepercayaan bahwa kegiatan yang dilakukan akan mempunyai dampak atau efek.

Negara-negara demokratis umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat, lebih baik. Dalam alam pikiran ini tingginya tingkat partisipasi menunjukan bahwa warga negra mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan partisipasi tersebut. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena diartikan bahwa, jika berbagai pendapat kurang mendapat kesempatan untuk dikemukakan, pimpinan Negara akan kurang tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan cenderung untuk melayani kepentingan beberapa kelompok saja.

Partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting dalam mengkaji pemilihan umum, masalah tersebut banyak dikaji terutama dinegara-negara berkembang. Partisipasi politik ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok-kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya terdapat beberapa definisi yang dikemukakan para sarjana berkaitan dengan partisipasi politik, sebagai berikut :

Herbert McClosky (dalam Sanit, 1998:2) mengemukakan tentang definisi mengenai partisipasi politik sebagai berikut :

> “Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum”

Berikut ini dikemukakan sejumlah “rambu-rambu” partisipasi politik :

Pertama, partisipasi politik berupa kegiatan atau perilaku luar individu warga Negara biasa yang dapat diamati, bukan perilaku dalam yang berupa sikap dan orientasi. Karena sikap dan orientasi tidak selalu termanifestasikan dalam perilakunya.

Kedua, kegiatan tersebut diarahkan untuk mempengaruhi perilaku selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik. Seperti mengajukan sebuah alternative kebijakan umum, dan kegiatan untuk mendukung atau menentang keputusan politik yang dibuat pemerintah.

Ketiga, kegiatan yang berhasil (efektif) maupun yang gagal mempengaruhi pemerintah termasuk dalam konsep partisipasi politik.

Keempat, kegiatan mempengaruhi kebijakan pemerintah secara langsung yaitu mempengaruhi pemerintah dengan menggunakan perantara yang dapat meyakinkan pemerintah.

Kelima, mempengaruhi pemerintah dengan prosedur yang wajar dan tanpa kekerasan seperti ikut memilih dalam pemilu, mengajukan petisi, bertatap muka, dan menulis surat atau dengan prosedur yang tidak wajar seperti kekerasan, demonstrasi, mogok, kudeta, revolusi, dan lainnya.

Norman H. Nie dan Sidney Verba (dalam Sanit, 1998:3) menjelaskan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga Negara yang legal yang sedikit banyak bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat Negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka. Oleh karena itu, partisipasi politik diteropong dari tindakan-tindakan yang diambil untuk mempengaruhi

keputusan-keputusan pemerintah. Di Negara-negara demokratis pada umumnya dianggap bahwa semakin besar partisipasi politik, lebih baik. Dalam pemikiran ini menunjukan bahwa warga Negara mengikuti dan memahami masalah-masalah politik dan ingin melibatkan diri di dalam kegiatan-kegiatan itu.

Huntington dan Nelson (dalam Sanit, 1998:4), membedakan antara partisipasi politik yang otonom (*autonomous participation*) dengan partisipasi politik yang dimobilisasi atau dikerahkan oleh orang lain *(Mobilized Participation).* Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa dalam setiap kegiatan partisipasi terdapat unsur tekanan atau manipulasi, akan tetapi di Negara-negara barat unsur ini relatif lebih sedikit.

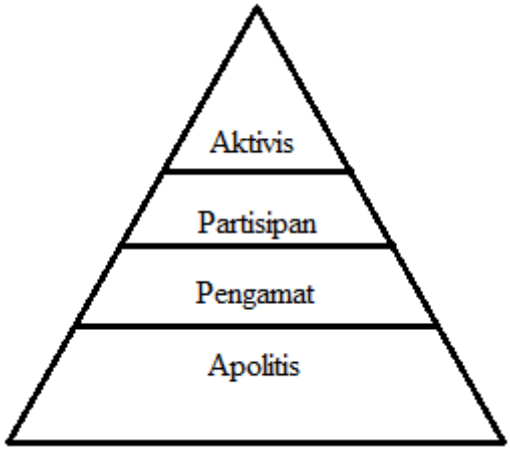
Intensitas partisipasi politik individu tersebut akan sangat dipengaruhi oleh, *Resources, Skill, Money and Knowledge* yang dimiliki oleh masing-masing individu sebgaimana yang dijelaskan Ramlan Surbakti (1992:107) bahwa :

> “Partisipasi sebagai suatu kekuatan politik dapat dibedakan menjadi dua yakni, partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif bilamana merujuk pada pendapat Rath dan Wilson, dapat diilustrasikan sebagai kelompok pengamat partisipasi dan aktivis. Sedangkan partisipasi pasif adalah, mereka yang apolitik atau suatu kegiatan atau tindakan masyarakat yang mentaati, menerima, dan melaksanakan apa saja setiap keputusan yang dibuat pemerintah”.

Kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai bermacam-macam bentuk dan intesitas. Biasanya dilakukan perbedaan jenis partisipasi menurut frekuensi dan intensitasnya. David F. Roth dan Frank L. Wilson (1976:45) menggambarkan empat kategori derajat partisipasi politik sebagai berikut :

Gambar 2.1

Piramida Partisipasi Politik



Sumber : David F. Roth dan Frank L (1998:7)

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam setiap derajat partisipasi politik dalam piramida tersebut adalah. Pertama, apolitis yaitu warga pemilih yang apatis atas pemilihan-pemilihan yang diselenggarakan oleh pemerintah, sehingga ia menarik dari partisipasi politiknya. Kedua, pengamat yaitu, mengorientasikan dirinya pada kehadiran mereka pada rapat-rapat umum, mengikuti perkembangan politik melalui media masa, memberikan suara dalam pemilihan umum. Ketiga, para petugas kampanye, anggota aktif dari suatu partai atau kelompok kepentingan. Dan keempat, aktivitas dari pejabat partai penuh waktu atau pemimpin partai atau kelompok kepentingan.

Intensitas partisipasi individu dapat digolongkan kepada dua kategori besar, yaitu intensitas partisipasi politik yang intensif dan partisipasi politik yang tidak intensif. Partisipasi yang intensif yaitu berkaitan dengan kegiatan individu dalam partai politik, kelompok kepentingan dan kelompok penekan sedangkan partisipasi intensif adalah berkaitan dengan pemilihan umum.

Milbratt dan Gole (1977:52) juga membagi intensitas kegiatan partisipasi politik menjadi empat kategori sebagai berikut :

> “Pertama, apatis yaitu orang yang tidak berpartisipasi dan menarik dari proses politik. Kedua, speaktator yaitu orang yang setidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. Ketiga, gladiator yaitu mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik. Dan Keempat, pengkritik yaitu individu yang melakukan partisipasi dalam bentuk non-konvesional”.

Partisipasi non-konvesional merujuk kepada pendapat atau teori dari Gabriel A. Almond, yaitu suatu kegiatan masyarakat atau individu yang berupa pengajuan petisi demonstrasi, konfrontasi, tindakan kekerasan terhadap harta benda (pengrusakan, pengeboman, pembunuhan, dan lainnya) sedangkan tindakan kekerasan terhadap manusia (penculikan, pembunuhan, dan lainnya) bahkan sampai pada perang gerilya dan revolusi sekalipun.

Salah satu sarana untuk berpartispasi politik adalah partai politik. Partai politik menurut Mark N. Hangopian (dalam Amal, 1988) merupakan :

> “Suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijakan publik dalam kerangka dan prinsip-prinsip kepentingan ideologis tertentu dalam praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan”.

Dengan demikian, kesadaran akan makna dari partisipasi politik ini sangat terkait dengan peran partai politik, pemerintah dan lembaga-lembaga pendidikan dalam memberikan sosialisasi politik dan pendidikan politik yang berkesinambungan kepada masyarakat.

Partai politik merupakan sebuah organisasi yang bersusun-susun, permanen dan terbatas umur hidupnya. Dengan partai politik akan lebih mudah menonjolkan tema dan permasalahan karena tanda partai menjadi pengenalan, sebagaimana dikemukakan Steinberg (1981:9) :

> “Identifikasi partai politik merupakan darah untuk dukungan para pemilih yang mempunyai gambaran baik tentang partai. Atas dasar itu, timbul hubungan yang jelas antara pemilih, kandidat dan partai politik, program partai dan permasalahan, serta sasaran yang ditujukan kepada kelompok pemilih”.

Batasan tersebut menunjukan bahwa partai politik mempunyai keharusan melakukan sosialisasi kepada konstituen termasuk para pemilih pemula untuk membangun hubungan yang baik antara pemilih dengan partainya termasuk dengan calon anggota legislatif. Penjaringan dukungan harus dilakukan dengan melakukan segmentasi konstituen untuk menentukan pendekatan yang akan digunakan dalam mensosialisasi partai dan calegnya. Demikian juga yang harus dilakukan terhadap para pemilih pemula dari kalangan mahasiswa, maka partai politik sebelum melakukan marketing harus menyesuaikan diri dengan karakter siswa tersebut. Sehingga pada akhirnya mereka mau terlibat atau berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Partisipasi yang dikutip dari buku “*Pengantar Ilmu Pemerintahan*” mengatakan bahwa:

> “Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama” (Syafiie, 2001:142).

Berdasarkan definisi di atas, partisipasi merupakan keterlibatan individu dalam situasi dan kondisi organisasinya. Keterlibatan tersebut dapat mendorong individu untuk berperan serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasinya yaitu partai politik.

Robert P. Clark seorang guru besar pada Universitas *George Mason* mengemukakan pendapatnya tentang partisipasi politik dalam judul bukunya *"Power and Policy in The Third World"* yang dikutip oleh Soemarno dalam bukunya "*Komunikasi Politik*" menyatakan bahwa perkataan "partisipasi politik" dapat diartikan berbeda-beda bergantung kepada kultur politik (budaya politik) yang melandasi kegiatan partisipasi tersebut (Clark dalam Soemarno, 2006:129-130). Maksud dari definisi di atas, partisipasi politik dapat diartikan berbeda-beda sesuai kultur politik yang melandasi.

Menurut Myron Weiner yang dikutip dalam bukunya Mochtar Mas'ud dan Colin Mac Andrew dalam bukunya yang berjudul *Perbandingan Sistem Politik*, paling tidak terdapat lima hal yang menyebabkan timbulnya gerakan kearah partisipasi lebih luas dalam proses politik ini antara lain:

> 1. Modernisasi, komersisialisasi pertanian, industrrialisasi, urbanisasi yang meningkat, penyebaran kepandaian baca tulis, perbaikan pendidikan, dan pengembangan media komunikasi massa. Ketika penduduk kota baru yang buruh, pedagang mempengaruhi nasib mereka sendiri, mereka makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik.
> 2. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial, begitu bentuk suatu kelas pekerja baru dan kelas menengah yang meluas dan berubah selama proses industrialisasi dan modernisasi, masalah tentang siapa yang berhak berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan perubahan dalam pola partisipasi politik.
> 3. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa Modern; kaum intelektual, sarjana, filsof, pengarang dan wartawan sering mengemukakan ide-ide seperti egalitarisme dan nasioalisame kepeda masyarakat umum untuk membangkitkan tuntutan akan partisipasi massa yang luas dalam pembuatan keputusan politik.
> 4. Konflik di antara Kelompok-Kelompok pemimpin politik; kalau timbul kompetisi memperebutkan kekuasaan, strategi yang biasa digunakan oleh kelompok-kelompok yang saling berhadapan adalah mencari dukungan rakyat.
> 5. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial ekonomi dan kebudayaan; perluasan kegiatan pemerintah dalam bidang-bidang kebijaksanaan baru biasanya berarti bahwa konsekuensi tindakan-tindakan

> pemerintahan menjadi semakin menyusup ke segala segi kehidupan sehari-hari rakyat. Tanpa hak-hak sah atas partisipasi politik, individu-individu betul-betul tidak berdaya menghadapi dan dengan mudah dapat dipengaruhi oleh tindakan-tindakan pemerintah yang mungkin dapat ruang lingkup aktivitas pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisir akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik.
> (Myron dalam Machtar Mas'ud & Colin mac Andrew 1985: 42-45).

Berdasarkan definisi-definisi yang sudah dikemukakan itu, maka dapat diperoleh pengertian yang lebih sederhana bahwa partisipasi politik adalah : (1) perilaku atau tindakan warga Negara kebanyakan; (2) untuk mempengaruhi pemerintah dengan cara yang sah dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan, serta ikut menentukan personal pemimpin; (3) baik dengan cara langsung maupun tidak langsung; (4) bersifat otonomi dan mandiri. Bentuk-bentuk partisipasi politik bermacam-macam. Diantaranya adanya partisipasi aktif dan partisipasi pasif, sebagaimana disebut oleh Surbakti (1999), bahwa terdapat beberapa bentuk dari partisipasi politik yaitu :

> "Kegiatan yang dimaksud antara lain mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik, dan koreksi atas pelaksanaan suatu kebijakan umum, dan mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu, mengajukan alternative pemimpin tertentu, memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum".

Berdasarkan pendapat diatas bentuk partisipasi diantarnya adalah mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu, dan ikut serta dalam pemilihan umum. Aktifitas seseorang dalam pemilu dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk partisipasi yang aktif untuk mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu membangun daerah atau Negara nya untuk maju dan menjadi lebih baik.

Sementara itu, Gaffar (1991:26) menyebutkan adanya dua macam kegiatan partisipasi politik; yakni kegiatan yang berkaitan dengan pemilihan umum dan kegiatan yang tidak berkaitan dengan pemilihan umum, sebagai berikut :

> "Para ahli politik pada umumnya menggolongkan kegiatan tersebut ke dalam dua kelompok besar, yaitu apa yang disebut kegiatan dalam kaitannya dengan *electrical activities*, yaitu segala macam kegiatan yang berkaitan dengan pemilihan umum dan yang tidak ada sangkut pautnya dengan pemilihan umum, *non electrical activities*".

Berdasarkan definisi diatas partisipasi politik dapat dilihat dalam dua bentuk, yang pertama partisipasi politik yang berhubungan dengan segalam macam mengenai pemilihan umum, yang dimaksudkan seperti kegiatan-kegiatan pemilu, kampanye politik, dan membuat partai politik. Sedangkan partisipasi politik yang tidak ada sangkut pautnya dengan pemilihan umu ialah partisipasi politik dengan cara ikut dalam diskusi-diskusi politik baik formal maupun nonformal, membuat organisasi masyarakat, ikut serta dalam pembangunan.

Menurut Maran (2007:148) bentuk partisipasi politik yang mungkin adalah sebagai berikut :

1. Menduduki atau mencari jabatan politik atau administratif,
2. Menjadi anggota aktif atau pasif dalam suatu organisasi politik,
3. Menjadi anggota aktif atau pasif dalam suatu organisasi semi-politik,
4. Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya,
5. Partisipasi dalam diskusi politik formal,
6. Partisipasi dalam pemungutan suara (*Voting*)

Mengingat partisipasi merupakan bentuk kegiatan sosial maka penjelasan selanjutnya lebih menekankan pada gerakan sosial yang menyangkut partisipasi masyarakat, termasuk partisipasi pemilih pemula sebagai bagian dari masyarakat karena seperti diketahui masyarakat terdiri dari Dewasa dan Remaja yang

mempunyai peran serta yang sama dalam peran publiknya, tidak ada dikhotomi antar keduanya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka partisipasi dalam politik merupakan keterlibatan individu-individu anggota masyarakat atau dari suatu kelompok untuk bertanggung jawab terhadap tujuan bersama khususnya dalam bidang politik. Dalam hal ini, keterlibatan masyarakat (individu atau kelompok), terutama pemilih pemula yang bertanggung jawab sepenuhnya atas segala keputusan bersama demi terwujudnya tujuan bersama dalam ranah politik sebagai salah satu programnya. Sebagaimana yang dinyatakan Yusuf (1989:19) bahwa dalam partisipasi masyarakat sebagai suatu kelompok :

> "Kelompok sebagai unsur penting dalam partisipasi merupakan visi psikologis dan sosial. Kelompok adalah gerakan psikis yang determinan dan berinteraksi dengan sesamanya secara bertatap muka dengan serangkaian pertemuan, dimana masing-masing anggota saling menerima impresi atau persepsi anggota lain yang membuat masing-masing individu bereaksi sebagai reaksi dari individu lainnya".

Berdasarkan pendapat diatas dalam partisipasi masyarakat tidak dapat lepas dari adanya kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan ini dapat disebut seperti partai politik, yang mempunyai tujuan yang ingin dicapai dengan bersama-sama oleh anggota-anggotanya.

Berkaitan dengan partisipasi politik, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nurcholis Madjid (1995:558), bahwa partisipasi politik sesungguhnya cukup mengandung problematik, jangankan dinegara yang masih berkembang seperti di Indonesia, dinegara yang telah mengalami kemajuan dalam demokrasi, ditunjang dengan kemajuan sains dan teknologi contohnya seperti Amerika (USA),

partisipasi politik masih dikesani bahkan merupakan sesuatu yang sangat sarat dengan probelmatika.

Kenyataan bahwa partisipasi politik masih mengandung problematika, itu dapat saja dibuktikan untuk mewujudkan partisipasi politik yang baik, benar, dan terarah memang sangat sulit untuk ditemukan. Selanjutnya, untuk mewujudkan demokrasi perlu dukungan dari berbagai elemen negeri ini. Paling tidak, menurut Hikam (dalam Culla, 1990:134), ada tiga elemen (aktor) politik yang sebenarnya dapat diharapkan menjadi motor demokratisasi dinegara berkembang, termasuk di Indonesia. Pertama, kaum cendikiawan dan akademis; kedua, kelas menengah secara umum; dan ketiga, elemen politik arus bawah terutama buruh dan tani.
Dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat, menurut Sastropoetro (1986:13) dipengaruhi oleh faktor pendidikan, agama, motivasi, kesempatan kerja dan peluang berpartisipasi.

2.1.2 Faktor-faktor Partisipasi Politik

Adapun menurut Milbrath dalam Maran (2007:156) menyebutkan dua faktor utama yang mendorong orang berpartisipasi politik, bahwa adanya faktor pendukung dan faktor penghambat yang dimana didalam faktor pendukung terdapat lima unsur diantaranya adanya perangsang politik, karakteristik pribadi seseorang, karakteristik sosial, situasi atau lingkungan politik, dan pendidikan politik. Dari dua faktor utama yang dikatakan Milbrath, terdapat faktor penghambat juga yang mendorong orang tidak berpartisipasi politik, unsur yang ada dalam faktor penghambat tersebut yaitu kebijakan induk yang selalu berubah,

pemula yang otonom, dan dukungan yang kurang dari induk organisasi untuk mensukseskan.

Lima faktor utama yang mendorong orang berpartisipasi politik, antara lain :

1. *Sejauh mana orang menerima perangsang politik*. Karena adanya perangsang, maka orang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam hal ini minat berpatisipasi dipengaruhi misalnya sering mengikuti diskusi-diskusi politik melalui media masa atau melalui diskusi formal maupun informal.
2. *Faktor karakteristik pribadi seseorang*. Orang-orang yang berwatak sosial yang mempunyai kepedulian sosial yang besar terhadap problem sosial, politik, ekonomi, sosial budaya, hankam, biasanya mau terlihat dalam aktivitas politik.
3. *Karakteristik sosial.* Menyangkut status sosial ekonomi, kelompok ras, etnis, dan agama seseorang. Bagaimanapun juga lingkungan sosial itu ikut mempengaruhi persepsi, sikap perilaku seseorang dalam bidang politik. Oleh sebab itulah, mereka mau berpartisipasi dalam bidang politik.
4. *Situasi atau lingkungan politik itu sendiri*. Lingkungan politik yang kondusif membuat orang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam lingkungan politik yang demokratis orang merasa lebih bebas dan nyaman untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik dari pada dalam lingkungan politik yang otoriter. Lingkungan politik yang sering diisi dengan aktivitas-aktivitas brutal dan kekerasan dengan sendirinya menjauhkan masyarakat dari wilayah politik.
5. *Pendidikan Politik.* Ada pula yang menambahakan sebagai pendidikan politik sebagai warga Negara merupakan faktor pendukung lainnya yang sifatnya internal bagi suatu kelompok yang melaksanakan partisipasi politiknya. Milbrath dalam Maran (2007:156)

Dengan demikian faktor yang menjadi motivasi pemilih pemula berpartisipasi politik dalam Pilgub yang relevan dengan yang telah dikemukakan diatas yaitu adanya perangsang karena pemilih pemula selalu berdiskusi dengan tema disesuaikan dengan kebutuhan diantaranya tentang politik, sosial, budaya, pendidikan dan lain sebagainya baik dilakukan secara formal maupun informal. Faktor karakteristik pribadi, karena sebagian besar pemilih pemula bergerak

dibidang pendidikan namun juga dibidang sosial yang mempunyai kepedulian besar terhadap problem sosial, ekonomi sampai mau terlibat dalam aktivitas politik. Karakteristik sosial seseorang, karena pemilih pemula menghargai nilai keterbukaan serta kejujuran, keadilan sampai pada akhirnya mau menegakkannya dalam bidang politik dengan kata lain berpartisipasi dengan mempunyai misi. Situasi yang kondusif pemilih pemula berpartisipasi dalam politik dengan asas demokrasi. Serta faktor pendorong secara internal dari organisasinya adalah pendidikan politik secara nasional serta memulai eksistensi atau anggotanya.

Selain faktor pendukung, Milbrath juga menyebutkan 3 faktor yang dapat menjadi panghambat suatu partisipasi politik. Adapun faktor penghambat dari partisipasi politik itu antara lain :

1. Kebijakan Induk organisasi selalu berubah. Maksud dari kebijakan induk selalu berubah ini, organisasi atau badan yang dipandang elite politik dalam tubuh suatu organisasi masyarakat atau seorang pemilih selalu merubah kebijakan terhadap partisipasi yang ada dengan yang baru sesuai situasi dan kondisi.
2. Pemilih pemula yang Otonom. Pemilih pemula yang otonom akan membuat gerakan politisnya tidak independen, pemilih pemula tersebut berada dalam hubungan suatu organisasi induknya, baik sifatnya konsultasi atau koordinasi.
3. Dukungan yang kurang dari induk untuk mensukseskan. Dukungan yang kurang selama proses partisipasi politik akan menghambat aktivitas politik pemilih pemula, komunikasi dengan induk organisasi harus terjalin baik dan tetap harus diperhatikan.

Berdasarkan pendapat diatas dalam partisipasi politik terdapat juga faktor penghambat yang dapat membuat seseorang untuk tidak berpartisipasi dalam kegiatan politik, yaitu kebijakan induk organisasi yang selalu berubah, pemilih pemula yang otonom, dan dukungan yang kurang dari induk organisasi untuk

mensuksekan kegiatan politik. Dengan tiga faktor itu seseorang bias menjadi tidak berpartisipasi politik dalam kegiatan politik seperti pemilu.

2.1.3 Dimensi Partisipasi Politik

Adapun dimensi partisipasi yang dapat mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum seperti yang dikemukakan oleh James Rosenau yang dikutif dalam bukunya Jalaluddin Rakhmat yang berjudul *Komunikasi Politik Khalayak dan Efek* antara lain:

(1) Gaya partisipasi
(2) Motif partisipasi
(3) Konsekuensi partisipasi seorang dalam politik (Rakhmat: 2000:127)

1. Gaya partisipasi

Gaya mengacu kepada baik apa yang dilakukan maupun bagaimana ia melakukan sesuatu kegiatan. Seperti gaya pembicaraan politik (antara singkat dan bertele-tele), gaya umum partisipasi pun bervariasi. Adapun yang termasuk dalam gaya partisipasi sebagai berikut:

a. Langsung/wakilan,

Orang yang melibatkan diri sendiri (actual) dengan hubungan yang dilakukan terus-menerus dengan figur politik dengan cara menelepon, mengirim surat, dan mengunjungi kantor pemerintah. Yang lain bertindak terhadap politikus, tetapi tidak bersama mereka, misalnya mereka memberikan suara untuk memilih pejabat pemerintah yang belum pernah dilihat atau ditemuinya

b. Kentara/tak kentara,

Seseorang mengutarakan opini politik, hal itu bisa meningkatkan kemungkinan diperolehnya keuntungan material (seperti jika mendukung seorang kandidat politik dengan imbalan diangkat untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan).

c. Individual/kolektif

Bahwa tekanan dalam sosialisasi masa kanak-kanak, terutama dalam kelas-kelas pertama sekolah dasar, adalah pada gaya partisipasi individual (memberikan suara, mengirim surat kepada pejabat, dsb). Bukan pada memasuki kelompok terorganisasi atau pada demontrasi untuk memberikan tekanan kolektif kepada pembuatan kebijakan.

d. Sistematik/acak

Beberapa individu berpartisipasi dalam politik untuk mencapai tujuan tertentu, mereka bertindak bukan karena dorongan hati, melainkan berdasarkan perhitungan, pikiran, perasaan, dan usul mereka utnuk melakukan sesuatu bersifat konsisten, tidak berkontradisi, dan tindakan mereka kesinambungan dan teguh, bukan sewaktu-waktu atau dengan intensitas yang berubah-ubah.

e. Terbuka/Tersebunyi

Orang yang mengungkapkan opini politik dengan terang-terangan dan tanpa ragu-ragu, dan yang menggunakan berbagai alat yang dapat diamati untuk melakukannya, bergaya partisipasi terbuka.

f. Berkomitmen/ Tak berkomitmen

Warga negara berbeda-beda dalam intensitas partisipasi politiknya. Orang yang sangat mendukung tujuan, kandidat, kebijakan, atau program bertindak dengan semangat dan antusias; ciri yang tidak terdapat pada orang yang memandang pemilihan umum hanya sebagai memilih satu orang dengan orang lain yang tidak ada bedanya.

g. Derita/kesenangan

Seseorang bisa menaruh perhatian politik dan melibatkan deritanya karena kegiatan politik itu sendiri merupakan kegiatan yang menyenangkan. Yang lain ingin mencapai sesuatu yang lebih jauh dari politik melalui partisipasi.

2. Motif partisipasi

Berbagai faktor meningkatkan atau menekan partisipasi politik. Salah satu perangkat faktor itu menyangkut motif orang yang membuatnya ambil bagian. Motif-motif ini, seperti gaya partisipasi yang diberikannya berbeda-beda dalam beberapa hal sebagai berikut:

a. Sengaja/tak sengaja

Beberapa warga negara mencari informasi dan berhasrat menjadi berpengetahuan, mempengaruhi suara legislator, atau mengarahkan kebijaksanaan pejabat pemerintahan

b. Rasional/emosional

Orang yang berhasrat mencapai tujuan tertentu, yang dengan teliti mempertimbangkan alat alternatif untuk mencapai tujuan itu, dan kemudian

memilih yang paling menguntungkan di pandang dari segi pengorbanan dan hasilnya disebut bermotivasi rasional.

c. Kebutuhan psikologis/sosial

Bahwa kadang-kadang orang memproyeksikan kebutuhan psikologis mereka pada objek-objek politik misalnya, dalam mendukung pemimpin politik karena kebutuhan yang mendalam untuk tunduk kepada autoritas, atau ketika memproyeksikan ketidakcukupannya pada berbagai kelas “musuh” politik yang dipersepsi-minoritas, negara asing, atau politikus dari partai oposisi.

d. Diarahkan dari dalam/dari luar

Perbedaan partisipasi politik yang dengan motivasi batiniah dan motivasi sosial untuk berpartisipasi politik.

e. Berpikir/tanpa berpikir

Setiap orang berbeda dalam tingkat kesadarannya ketika menyusun tindakan politik. Perilaku yang dipikirkan meliputi interpretasi aktif dari tindakan seseorang dan perkiraaan konsekuensi tindakan itu terhadap dirinya dan orang lain.

3. Konsekuensi partisipasi seorang dalam politik

Partisipasi politik yang dipikirkan dan interpretatif dibandingkan dengan jenis yang kurang dipikirkan dan lebih tanpa disadari menimbulkan pertanyaan tentang apa konsekuensi partisipasi bagi peran seseorang dalam politik pada umumnya. Konsekuensi partisipasi seorang dalam politik tersebut memiliki beberapa hal antara lain:

a. Fungsional/disfungsional

Tidak setiap bentuk partisipasi mengajukan tujuan seseorang. Jika misalnya tujuan seorang warga negara adalah melaksanakan kewajiban Kewarganegaraan yang dipersepsi, maka pemberian suara merupakan cara fungsional untuk melakukannya.

b. Sinambung/terputus

Jika partisipasi politik seseorang membantu meneruskan situasi, program, pemerintah atau keadaan yang berlaku, maka konsekuensinya sinambung. Jika partisipasi itu mengganggu kesinambungan kekuatan yang ada, merusak rutin dan ritual, dan mengancam stabilitas, partisipasi itu terputus.

c. Mendukung/menuntut

Melalui beberapa tipe tindakan, orang menunjukan dukungan mereka terhadap rezim politik yang ada dengan memberikan suara, membayar pajak, mematuhi hukum, menyanyikan lagu kebangsaan, berikrar setia kepada bendera, dan sebagainya. Melalui tindakan yang lain mereka mengajukan tuntutan kepada pejabat pemeintahan-mengajukan tuntutan kepada pejabat pemerintahan. Mengajukan petisi kepada anggota kongres dengan surat, kunjungan, dan tetepon; lobbying atau menarik kembali dukungan *financial* dari kampaye kendidat.

Berdasarkan dimensi partisipasi politik di atas, bahwa dalam partisipasi politik orang mengambil bagian dalam politik dengan berbagai cara. Cara-cara itu berbeda-beda dalam tiga hal atau dimensi yakni: gaya umum partisipasi, motif partisipasi yang mendasari kegiatan mereka, dan konsekuensi berpartisipasi pada peran seseorang dalam politik.

2.1.4 Pendekatan dalam partisipasi politik

Suwondo (2005) menerangkan bahwa partisipasi politik dapat dilihat dari beberapa pendekatan yaitu : Pertama, pendekatan yang menekankan pada faktor sosiologi didalam membentuk sikap dan tindakan masyarakat untuk melakukan pilihan di pemilihan umum. Pendekatan sosiologis melihat dari pendekatan pada pentingnya peranan kelas atas preferensi seseorang. Pendekatan ini menyakini bahwa kelas merupakan basis pengelompokan politik, sebab partai-partai politik tumbuh dan berkembang berdasarkan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat yang berlainan karena kepentingan ekonomi masing-masing.

Pendekatan partisipasi tidak hanya didasarkan kepada perbedaan kelas tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan seseorang, daerah tinggal seseorang, pekerjaan seseorang dan lain sebagainya, khususnya berkaitan dengan sisi sosiologis. Misalnya pertama, individu/ masyarakat yang mengidentifikasikan dirinya sebagai “orang kecil” akan memberikan suaranya kepada calon anggota legislatif atau partai politik yang mempunyai positioning dengan cara mengidentifikasikan dirinya seperti rakyat pemilih sebagai partai wong cilik. Kedua, rakyat pemilih yang tinggal di suatu daerah / bekerja di suatu kantor / bekerja disuatu tempat, yang kebetulan daerah atau kantor atau tempat tersebut dikenal sebagai basis suatu sekelompok tertentu, sehingga secara tidak langsung akan memilih calon-calon anggota legislatif dan partai politik ditempat tinggalnya atau ditempat mereka bekerja. Ketiga, masyarakat / individu yang berpendidikan tinggi akan memilih calon-calon anggota legislatif dan partai politik yang mengidentifikasikan diri pemilihnya sebagai orang-orang pintar atau cendikiawan.

Keempat, dilihat dari sisi pekerjaan, akan ditarik suatu kesimpulan yang menyatakan bahwa, pemilih yang bekerja sebagai guru akan memilih calon anggota legislatif yang berasal dari golongan guru pula, para pegawai dikantor atau suatu dinas akan cenderung memilih calon anggota legislatif yang berasal dari lingkungan mereka sendiri dan seterusnya.

Pendekatan kedua, pendekatan yang lebih memberikan penekanan kepada faktor psikologis dari pemilih itu sendiri. Pendekatan psikologis, menjelaskan bahwa partisipasi menitik beratkan pada kedekatan seseorang terhadap calon anggota legislatif, karena kedekatannya dengan agama yang dianut, atau juga pekerjaan orang tua dan lain sebagainya. Leo Agustino (2005:2) merumuskan sebagai berikut :

> "Pertama, keyakinan sosioreligius dimana keyakinan keagamaan merupakan variabel yang signifikan dalam mempengaruhi politik seseorang. Ilustrasi yang sederhana untuk menunjukkan hal itu dapat merujuk pada penelitian Geertz (meskipun kasusnya berbeda), menurutnya kaum santri (memiliki ke Islaman lebih kental dibandingkan dengan kaum abangan) akan secara pasti memilih calon anggota legislatif yang diidentifikasikan oleh rakyat pemilih sebagai person yang memilik nilai ke islaman yang lebih tinggi disbanding calon legislatif yang lainnya. Sedangkan mereka yang mengidentifikasikan dirinya sebagai kaum abangan, akan memilih calon anggota legislatif dari kelompok abangan pula, bahkan non islam pula.
> Kedua, pola kedaerahan dimana dapat dicontohkan ada dua calon anggota legislatif, calon pertama dari luar kota bandung (meskipunia telah lama tinggal di kota bandung) dan calon kedua dari kota bandung sendiri (variannya dapat dibesarkan diluar kota bandung atau tidak), dan bilamana seseorang pemilih dari luar kota bandung yang kebetulan berasal sama dengan calon legislatif dari daerah pertama, dan begitu pula sebaliknya.
> Ketiga, pola kepemimpinan biasanya sikap pemilih khususnya masyarakat desa sangat dipengaruhi oleh peran pemimpin non formal, seperti kyai-kyai atau keturunan darah biru daerah dan lain sebagainya. Kembali merujuk pada pandangan Geertz, dimana sikap kaum santri akan sangat dipengaruhi oleh petuah dari kyai-kyai, sedangkan sikap pemilih kaum abangan akan banyak dipengaruhi oleh peran guru. Dan bila para kyai meminta santrinya memilih calon anggota legislatif atau para guru

> meminta muridnya untuk memilih salah satu anggota legislatif tertentu, kesemuanya itu dilakukan oleh para santri atau para muridnya, maka tindakan tersebut dapat dijelaskan dengan menggunakan pendekatan psikologis". Leo Agustino (2005:2)

Disamping kedua pendekatan diatas, ada pula pendekatan rasional yang didasarkan pada logika untung rugi, pendekatan ini menyatakan bahwa memahami sikap pemilih tidak jauh berbeda dengan memahami sikap masyarakat dipasar. Pilihan politik masyarakat dan pilihan sangat ditentukan oleh *Individual Choice.*

Individual Choice yang dijelaskan dalam pendekatan ini sangat pasti berdasarkan pada preferensi pembeli, dikaitkan dengan sikap politik masyarakat di Indonesia. Pada pemilihan umum legislatif tahun 2004 seperti ilustrasi diatas gambarannya, manakah calon anggota legislatif menawarkan program-programnya pada rakyatnya pemilih, maka pemilih akan menyadarkan tawaran program tersebut pada preferensi-preferensi atau kebutuhan-kebutuhannya ke depan. Bilamana tawaran ternyata tidak mampu mengejawantahkan keinginannya tersebut atau paling tidak mendekati keinginan-keinginan / kebutuhannya ke depan. Sedangkan, menurut Alford (1963) sebagaimana dikutip oleh Rush dan Althoff (1983:73*)* *Individual Choice* yang dimiliki seseorang adalah hubungan antara pilihan partai dan karakteristik para pemberi suara yang berkaitan dengan lingkungan dan pengalamannya. Karakteristik ini, menurut Almond sebagai mana dikutip oleh Mohtar dan Mcnroe (1982:32) paling banyak dilakukan oleh golongan pemilih berusia muda yang mempunyai sikap yang lebih fleksibel terhadap sistem politik.

Karakteristik sikap politik pemilih pemula yang fleksibel yang dijelaskan oleh Rush dan Althoff (1983:35-38) sebagai akibat dari pengaruh agen-agen sosialisasi politik terhadap dirinya yang meliputi keluarga, pendidikan, kelompok sebaya, kelompok kerja, kelompok agama, keadaan sistem politik dan media masa. Menurut mereka anak-anak itu akan lebih mudah dipengaruhi oleh keluarga dan pendidikan, sedangkan orang dewasa lebih terpengaruh oleh kelompok-kelompok kerja dan media masa.

Selanjutnya Rush dan Althoff (1983:160-164) menyatakan bahwa, semakin peka atau terbuka seseorang terhadap rangsangan politik melalui kontak pribadi dan organisasi, serta melalui media masa maka semakin besar kemungkinan mereka berpartisipasi dalam kegiatan politik. Kepekaan dan keterbukaan tersebut menurut mereka berbeda dari satu orang dengan orang lainnya, dan bagaimanapun juga hal ini merupakan bagian dari proses sosial politik. Seseorang yang termasuk dalam suatu keluarga yang sering melakukan diskusi politik, atau menjadi anggota suatu organisasi yang mendorong aktivitas politik, akan terdorong pula dalam kegiatan politik. Demikian juga, terbukanya seseorang bagi media masa dapat memelihara minatnya dalam masalah-masalah politik, dan menambah kemungkinan partisipasinya dalam soal-soal tersebut.

Karakteristik sosial seseorang, yang meliputi status sosial ekonomi, kelompok ras atau etnik, usia, jenis kelamin, dan agama baik yang hidup di pedesaan maupun diperkotaan mempengaruhi partisipasi politik mereka.

2.1.5 Piramida Partisipasi Politik

Piramida partisipasi politik merupakan dampak dari kegiatan partisipasi politik warga negara memberi dampak cukup bermakna terhadap tatanan politik dan kelangsungan suatu kehidupan negara. Terutama di dalam mendekati tujuan negara yang hendak dicapai. Sehingga piramida partisipasi politik tersebut dapat diterapkan dalam menilai dan menganalisa partisipasi politik masyarkat dalam pemilihan umum, pemilihan kepala daerah maupun pemilihan kepala desa.

Menurut Hutington dan Nelson yang dikutip dalam bukunya Deden Faturahman dan Wawan Sobari yang berjudul *Pengantar Ilmu Politik* mengajukan dua kriteria penjelas dari partisipasi politik sebagai berikut:

> 1) Dilihat dari ruang lingkup atau proposisi dari suatu kategori warga negara yang melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan partisipasi politik.
> 2) Intensitasnya, atau ukuran, lamanya, dan arti penting dari kegiatan khusus bagi sistem politik. Hubungan antara dua kriteria ini, cenderung diwujudkan dalam hubungan "berbanding terbalik". Lingkup partisipasi politik yang besar biasanya terjadi dalam intensitas yang kecil atau rendah, misalnya partisipasi dalam pemilihan umum. sebaliknya jika ruang lingkup partisipasi politik rendah atu kecil, maka intensitasnya semakin tinggi. Contoh, kegiatan kelompok kepentingan. (Hutington dan Nelson dalam Faturahman dan Sobari, 2004:193)

Berdasarkan pendapat diatas partisipasi politik mempunyai dua kriteria penjelas, yaitu ruang lingkupnya dan intensitasnya atau ukurannya. Ruang lingkup partisipasi politik dilihat dari kategori-kategori masyarakatnya, sedangkan intensitas atau ukuran partisipasi politik dapat dilihat dari kegiatan politik itu sendiri.

Piramida partisipasi politik yang diuraikan dari David F. Roth dan Frank L. Wilson dapat dibagi sebagai berikut:

1. Aktivitas
2. Partisipan
3. Pengamat

(Roth dan Wilson dalam Soemarsono. 2002:4.8)

1. Aktivitas

Pada dasarnya partisipasi politik di tingkatan kategori aktivis. Para pejabat umum, pimpinan kelompok kepentingan merupakan pelaku-pelaku politik yang memiliki intensitas tinggi dalam berpartisipasi politik. Mereka memiliki akses yang cukup kuat untuk melakukan *contacting* dengan pejabat-pejabat pemerintah, sehingga upaya-upaya untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan pemerintah menjadi sangat efektif.

Terutama bagi pejabat umum, secara politis mereka memiliki peluang yang cukup kuat dalam mempengaruhi kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah, bahkan secara individual bisa mempengaruhi secara langsung. Namun warga negara yang terlibat dalam praktik-praktik partisipasi politik ditingkatkan aktivis, jumlahnya terbatas, hanya diperuntukkan bagi sejumlah kecil orang (terutama elit politik), yang memiliki kesempatan untuk terlibat dalam prose politik dengan mekanisme dan kekuatan pengaruh yang diperlihatkan.

Meskupun demikian, kegiatan partisipasi politik ditingkat aktivis, bukan saja ditempuh dengan cara-cara yang formal-prosedural atau mengikuti aturan yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan terdapat juga warga negara yang berupaya mempengaruhi proses politik, dengan cara-cara non foramal, tidak mengikuti jalur yang ditetapkan secara hukum, bahkan sampai pada tindakan kekerasan.

2. Partisipan

Partisipasi politik sebagai partisipan di tingkatan kategori partisipan seperti: adanya petugas kampaye, aktif dalam parpol/kelompok kepentingan, aktif dalam proyek-proyek sosial. Di tingkatan partisipan ditemukan semakin tingkat tinggi tingkat partisipasi politik seseorang maka semakin tinggi tingkat intensitasnya, dan semakin kecil luas cakupannya. Sebaliknya semakin menuju kebawah, maka semakin besar lingkup partisipasi politik, dan semakin kecil intensitasnya.

3. Pengamat

Partisipasi politik di tingkatan kategori pengamat, Seperti: menghadiri rapat umum, memberikan suara dalam pemilu, menjadi anggota kelompok kepentingan, mendiskusikan masalah politik, perhatian pada perkembangan politik, dan usaha meyakinkan orang lain, merupakan contoh-contoh kegiatan yang banyak dilakukan oleh warga negara, artinya proposisi atau lingkup jumlah orang yang terlibat di dalamnya tinggi. Namun tidak demikian dengan intensitas partisipasi politiknya, terutama kalau dikaitkan dengan arti pentingnya bagi sistem politik, praktik-praktik tersebut tingkat signifikasinya rendah, atau tingkat efektifitasnya dalam mempengaruhi kebijakan yang dibuat pemerintah, membutuhkan waktu dan sumber daya yang cukup banyak.

2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kepentingan melakukan penelitian terhadap partisipasi politik pemilih pemula di Kecamatan Andir dalam Pilgub Jawa Barat 2013, maka

disusunlah asumsi-asumsi sebagai faktor yang memungkinkan kerangka pemikiran untuk melakukan penelitian kualitatif ini terbentuk. Asumsi tersebut adalah sebagai berikut.

Kadar demokrasi suatu Negara dapat ditentukan oleh dua hal pokok yang dianggap keberadaannya penting. Pertama, seberapa besar peranan masyarakat dalam menentukan arah kebijakan publik. Penentuan kebijakan publik dalam literatur ilmu politik dapat dilakukan melalui mekanisme partisipasi politik, yang salah satunya dengan melaksanakan mekanisme pemilihan pejabat publik atau calon anggota legislatif secara langsung. Dalam hal ini, warga masyarakat dapat memilih secara langsung calon-calon anggota legislatif atau pejabat daerah yang dinilai oleh mereka sebagai individu yang dapat menangkap, mengapresiasikan dan mengimplementasikan aspirasi masyarakat pada saat para calon anggota legislatif atau pejabat daerah yang dipilihnya.

Setiap aktivitas kelompok yang dilakukan pasti mempunyai motivasi atau dorongan sebagai faktor pendukungnya. Begitupun bagi pemilih pemula, terbatas dalam melakukan aktivitasnya terutama dalam bidang politik karena pemilih pemula bukanlah organisasi politik. Ketika ada peluang serta harapan dan keinginan dari beberapa orang untuk bias berperan serta dalam pesta demokrasi maka mereka memanfaatkan peluang untuk berpartisipasi.

Adapun faktor motivasi pemilih pemula di Kecamatan Andir untuk berpartisipasi dalam pilgub 2013 yang dapat diasumsikan dan dipandang relevan dengan pendapat Milbrath dalam Maran (2007:156) yang menyebutkan dua faktor utama yang mendorong orang berpartisipasi politik, bahwa adanya faktor

pendukung dan faktor penghambat yang dimana didalam faktor pendukung terdapat lima unsur diantaranya adanya perangsang politik, karakteristik pribadi seseorang, karakteristik sosial, situasi atau lingkungan politik, dan pendidikan politik. Dari dua faktor utama yang dikatakan Milbrath, terdapat faktor penghambat juga yang mendorong orang tidak berpartisipasi politik, unsur yang ada dalam faktor penghambat tersebut yaitu kebijakan induk yang selalu berubah, pemula yang otonom, dan dukungan yang kurang dari induk organisasi untuk mensukseskan.

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas maka definisi operasional dalam penelitian ini adalah :

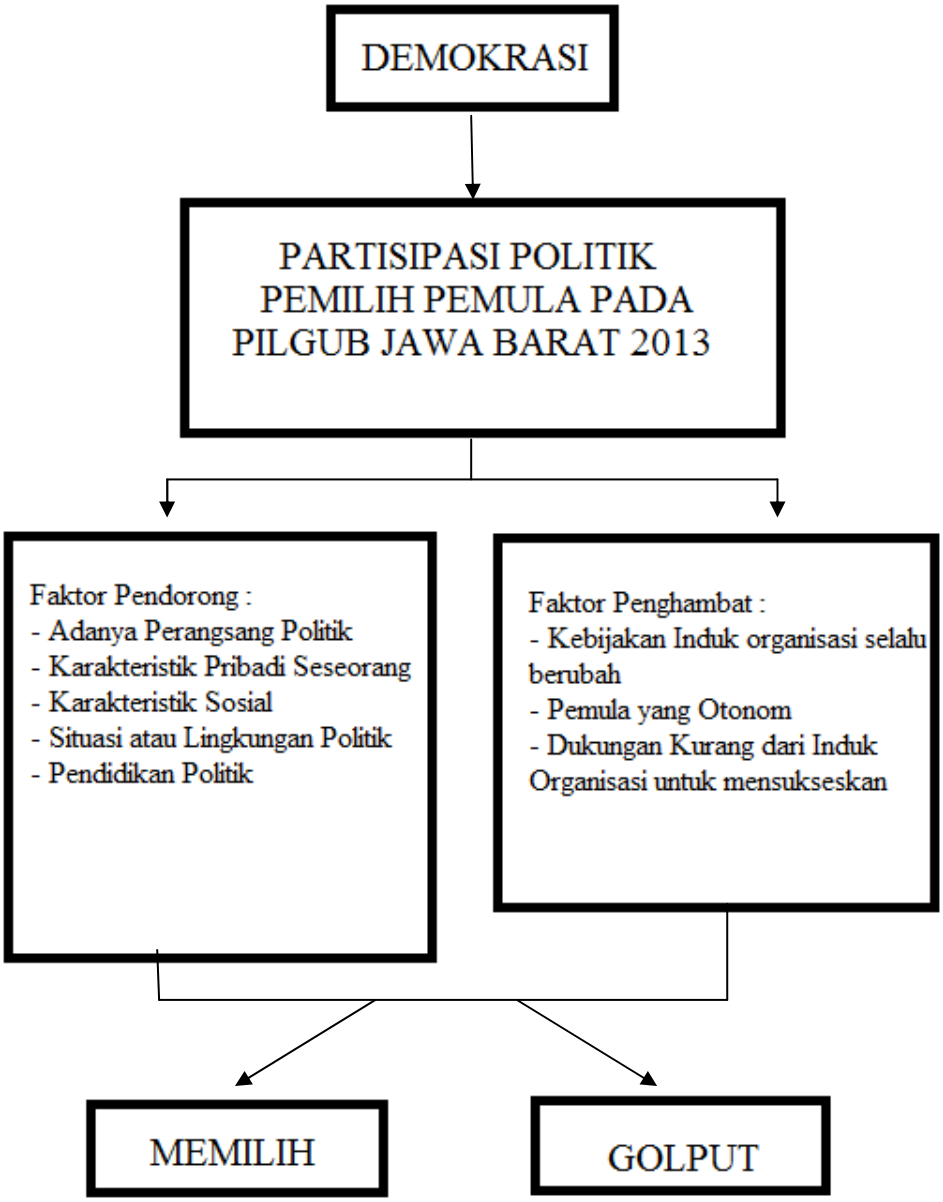
1. Partisipasi adalah kesedian, keikutsertaan, peran serta bersama-sama untuk mencapai tujuan, dan bersama-sama bertanggung jawab dalam suatu kegiatan, seperti dalam Pilgub Jawa Barat 2013.
2. Politik adalah usaha yang ditempuh warga Negara untuk kebaikan bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti partisipasi politik pemilih pemula di Kecamatan Andir Bandung dalam Pilgub Jawa Barat 2013.
3. Partisipasi Politik adalah keterlibatan warga dalam aktivitas-aktivitas politik sebagai usaha untuk membangun bangsanya, memilih pemimpin-pemimpin dalam Pemilu seperti pada Pilgub Jawa Barat 2013. Partisipasi politik terdiri dari beberapa indikator sebagai berikut :
    1) Faktor Pendukung Partisipasi adalah faktor yang mendorong seseorang untuk berpartisipasi politik, pada Pilgub Jawa Barat 2013. Faktor pendukung partisipasi adalah 5 :

a) Perangsang politik adalah suatu dorongan terhadap seorang pemilih agar mau berpatisipasi dalam kehidupan politik seperti dalam Pilgub Jawa Barat 2013. Perangsang politik dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan diskusi politik, pengaruh media massa, diskusi-diskusi formal dan informal.
b) Karakteristik pribadi seseorang adalah watak sosial seorang pemilih yang mempunyai kepedulian sosial yang besar terhadap masalah sosial, politik, ekonomi, dan hankam, yang biasanya mau terlibat dalam aktivitas politik seperti Pilgub Jawa Barat 2013.
c) Karakteristik sosial adalah status sosial, ekonomi, kelompok ras, etnis, dan agama seseorang yang akan mempengaruhi persepsi, sikap, perilaku seseorang dalam aktivitas politik seperti Pilgub Jawa Barat 2013.
d) Situasi atau lingkungan politik adalah keadaan lingkungan sosial sekitar seorang pemilih yang baik dan kondusif agar seorang pemilih mau dengan senang hati berpartisipasi dalam aktivitas politik seperti Pilgub Jawa Barat 2013.
e) Pendidikan politik adalah upaya pemerintah untuk merubah warga Negara agar dapat memiliki kesadaran politik dengan terlibat dalam aktivitas politik seperti Pilgub Jawa Barat 2013.

2) Faktor Penghambat Partisipasi Politik adalah faktor yang dapat membuat seorang pemilih enggan untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik seperti Pilgub Jawa Barat 2013. Faktor penghambat ini ada 3 yaitu :
    a) Kebijakan induk yang selalu berubah adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh induk organisasi pemilih pemula di Kecamatan Andir yang mengenai partisipasi politik yang bias berubah-ubah dan mengkontrol pemilih dalam aktivitas politik seperti Pilgub Jawa Barat 2013.
    b) Pemula yang otonom adalah seorang pemilih pemula yang berhak mengatur dan memilih pilihan atau keyakinan politiknya sendiri namun tidak bebas dan masih terikat, tetap berada dalam hubungan induk organisasinya yang menjadi tempat konsultasi dan koordinasi.
    c) Dukungan yang kurang dari induk organisasi untuk mensukseskan adalah komunikasi dan pendidikan politik yang terjalin kurang baik antara pemilih pemula dengan organisasinya dalam hal ini Sekolah-sekolah di Kecamatan Andir dalam kegiatan partisipasi politik seperti Pilgub Jawa Barat 2013.

4. Golput (Golongan Putih) adalah suatu hak atau pilihan juga bagi seorang pemilih untuk tidak menentukan pilihan terhadap satu pun calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilgub Jawa Barat 2013.
5. Pemilih Pemula adalah warga Negara yang berhak mengeluarkan pendapat, aspirasi, memilih pemimpin dalam pemilu (Pilgub Jawa Barat 2013) yang berusia minimal 17 tahun dalam hal ini pemilih pemula di Kecamatan Andir.
6. Pilgub (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur) adalah suatu proses demokrasi dengan cara memilih calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk satu Provinsi dengan sah dan sesuai undang-undang yang ada, dan diikuti dengan seluruh masyarakatnya, Seperti Pilgub Jawa Barat 2013.

Berdasarkan uraian itu, peneliti mencoba menggambarkan kerangka pemikiran mengenai partisipasi politik pemilih pemula di Kecamatan Andir dalam Pilgub Jabar 2013 sebagai berikut :



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Penelitian